



Artikel

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

Tio Pradena Putra¹, Roni Ekha Putera²

^{1 2} Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

* Korespondensi : tiopradena369@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta jumlah pegawai honorer yang sudah mengabdikan sekian tahun namun belum bisa diangkat menjadi ASN. Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dilihat klasifikasi ASN dibagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penerimaan PPPK untuk formasi teknis pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu instansi yang mengadakan penerimaan PPPK teknis adalah Pemerintah Kota Sawahlunto. Penulisan artikel ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan memanfaatkan Metode Deskriptif. Sementara itu Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel jurnal, surat kabar, berita online, serta website lembaga-lembaga terkait. Temuan penting dari tulisan ini adalah pertama, respon pemerintah terhadap masalah kebutuhan pegawai dengan kebijakan penerimaan PPPK Teknis. Kedua, koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait formasi kebutuhan pegawai teknis. Ketiga, kemampuan pegawai honorer yang belum sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina, sehingga setelah diadakan pengadaan pegawai PPPK Teknis banyak peserta yang tidak lulus nilai ambang batas. Akibatnya formasi teknis yang memiliki nilai ambang batas tinggi, banyak peserta yang tidak lulus dan formasi tersebut dibiarkan kosong oleh pemerintah. Faktor-faktor inilah yang memperlumit upaya pemerintah untuk mereformulasi pegawai ASN.

Kata Kunci: *Honorer, Implementasi Kebijakan, PPPK, Rekrutmen*

Abstract

This article discusses the Indonesian government's efforts to meet the needs of the State Civil Apparatus (ASN), as well as the number of honorary employees who have served for many years but have not been able to be appointed as ASN. By understanding the efforts, steps, and policies implemented by the government, it can be seen that the classification of ASN is divided into Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK). PPPK acceptance for technical formations in 2022 will be carried out by the Central Government and Regional Governments, one of the agencies that will receive technical PPPK is the City Government of Sawahlunto. Writing this article uses a Qualitative Approach by utilizing the Descriptive Method. Meanwhile, the data collection technique used is library research which utilizes books, journal articles, newspapers, online news, and websites of related institutions. The important findings from this paper are first, the government's response to the problem of employee needs with the PPPK Technical acceptance policy. Second, coordination is carried out by the regional government with the central government regarding the formation of technical staff needs. Third, the ability of honorary employees does not meet the competency standards set by the supervisory agency, so that after the procurement of Technical PPPK employees, many participants do not pass the threshold value. As a result, many participants did not pass technical formations that had high threshold values and these

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

formations were left vacant by the government. These factors complicate the government's efforts to reformulate ASN employees.

Keywords: Honorary, Policy Implementation, PPPK, Recruitment.

1. Pendahuluan

Honorer masih menjadi permasalahan yang belum selesai meskipun pemerintah telah membuat Undang-undang tentang ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendata sekitar 800 ribu honorer yang tersebar diseluruh Indonesia. Namun pada November 2022 jumlah honorer sebanyak 2,4 Juta honorer. Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai dimaksud, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru.

Kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional 2022 sebanyak 530.028. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Dari 439.338 kebutuhan di daerah, lebih rinci dijelaskan sebanyak 319.716 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang ditetapkan dari usulan 328.853. Kemudian, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan dari usulan 94.168, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis dari usulan 92.593. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis secara nasional.

Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua jenis kepegawaian berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan instansi. PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia mempunyai dan profesional yang selama ini kompetensinya tidak dapat dipenuhi oleh PNS. PPPK yang berlatar belakang profesional dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus secara cepat, ketika pekerjaan tersebut telah selesai maka kontrak PPPK pun dapat selesai.

Rekrutmen pegawai merupakan salah satu unsur penting dalam pengadaan pegawai dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan SDM Aparatur, harapan kedepan tercipta ASN yang profesional. Untuk itu dibutuhkan sistem rekrutmen yang mengacu pada kompetensi atau kualifikasi pendidikan yang sesuai bidang. Sekarang sudah tidak ada pengangkatan ASN melalui diskresi, dulu cukup melalui kewenangan kepala daerah tenaga honorer yang telah bekerja dalam jangka waktu lama akan diangkat langsung menjadi ASN. Namun tidak akan terjadi lagi karena sekarang ini seleksi ASN dilakukan dengan sistem seleksi berbasis komputer (CAT).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pertama kali menggunakan sistem CAT secara nasional yang dilaksanakan oleh 70 instansi pemerintah pada tahun 2013. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem CAT ini adalah tercipta transparansi karena hasil ujian bisa diketahui oleh peserta secara real time sehingga tidak akan terjadi manipulasi. Kemudian, dengan sistem CAT menciptakan efisiensi yang sangat besar dibandingkan sistem tes dengan menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). Seleksi PPPK pertama kali dilakukan pada tahun 2019 untuk honorer K2 baik Pendidik, tenaga Kesehatan, dan Penyuluh pertanian. Tahun 2021 pemerintah kembali membuka PPPK untuk honorer guru,

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

kesehatan, dan tenaga penyuluh. Namun tidak semua pemerintah daerah mengusulkan PPPK 2021 dikarenakan tidak ada anggaran untuk itu.

Pada tahun 2022 pertama kali dilaksanakan seleksi PPPK Teknis di 61 Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, total ada 110.434 formasi PPPK Teknis. Diketahui bahwa tahapan seleksi PPPK Teknis 2022 telah selesai dengan menyisakan banyaknya formasi kosong. Nilai ambang batas yang tinggi menyebabkan banyak peserta PPPK Teknis tidak lulus seleksi. Salah satu instansi yang melakukan rekrutmen PPPK Teknis adalah Kota Sawahlunto, berdasarkan keputusan menteri PANRB No.83 tahun 2022 tentang penerapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto untuk jabatan fungsional teknis ada 170 formasi. Pelaksanaan rekrutmen berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.18 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penulis ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang, melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan (Raihan, 2017). Artikel ini mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada tahapan rekrutmen PPPK Teknis tahun 2022 di Kota Sawahlunto. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, karena keterbatasan akses untuk melakukan wawancara secara langsung narasumber pemangku kepentingan pada saat tulisan ini dibuat.

Studi kepustakaan yang dimaksud sebagai data dalam artikel ini adalah upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita *online*, dan *website* lembaga-lembaga otoritatif (seperti menpan.go.id, dpr.go.id, dan kemenkopmk.go.id) yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji. Tulisan ini menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan Creswell yaitu pengorganisasian data, pembacaan dan pembuatan catatan, serta pendeskripsian, pengklasifikasian, dan penafsiran data menjadi kode dan tema (Puji Rianto, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Kebijakan

Impelementasi kebijakan pertama kali dipopulerkan oleh Harold Laswell (1956), sebagai ilmuwan yang mengembangkan studi kebijakan publik, Laswell menggas suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan proses. Menurutnya pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan yaitu penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. walaupun laswell tidak menekankan secara khusus terhadap arti penting implementasi kebijakan, namun sejak saat itu konsep implementasi kemudian menjadi suatu konsep yang mulai dikenal dalam disiplin ilmu politik, ilmu administrasi publik, dan khususnya ilmu kebijakan publik (Purwanto Erwan Agus & Sulistyastuti Dyah Ratih, 2012).

Menurut Anderson (1979) implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara administratif setelah kebijakan diterapkan. Ahli lain seperti Grindle (1980) memiliki pandangan mengenai implementasi kebijakan adalah membuat suatu

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

kaitan yang memperlancar tujuan-tujuan kebijakan agar digunakan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Model implementasi R. Vining (2010) penulis gunakan untuk melihat implementasi rekrutmen PPPK Teknis di Kota Sawahlunto tahun 2022. Ada tiga variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program yakni: logika kebijakan merupakan penilaian yang dilihat dari sudut pandang tujuan dan isi kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan merupakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat, kemampuan implementor kebijakan serta koordinasi dan komunikasi (Hanamunika et al., 2020).

3.2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai bagian dari aparatur negara, PPPK memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang. Pada pasal 22 UU ASN hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah (Maksin dan Hadi, 2022): seperti mendapatkan Gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan; mendapatkan hak dalam pengambilan cuti, mendapatkan bantuan dan jaminan seperti bantuan hukum jaminan yang berupa BPJS dan jaminan kematian, pengembangan kompetensi yang diadakan setiap tahun oleh instansi pemerintah.

Selain hak PPPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan perundangan. Kewajiban diatur dalam pasal 23 UU ASN yang berisi tentang:

- Memiliki sikap setia dan patuh kepada pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah secara konstitusi
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- Mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah disusun oleh pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan sebuah pekerjaan kedinasan yang dilaksanakan dengan jujur, penuh kesadaran, dan memiliki pengabdian serta tanggung jawab yang tinggi agar pekerjaan berjalan sesuai dengan arahan
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

3.3. Alur Pendaftaran PPPK Teknis

Pelaksanaan PPPK Teknis tahun 2022 dilakukan setelah seleksi PPPK Guru dan PPPK Kesehatan. Pengumuman seleksi dilakukan sejak 20 Desember 2022- 3 Januari 2023. Untuk Pendaftaran digelar pada 21 Desember – 6 Januari 2023, seleksi administrasi PPPK Teknis 2022 dilakukan pada 11 Januari 2023. Dokumen persyaratan untuk mendaftar PPPK Teknis 2022 adalah E-KTP, Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Transkrip Nilai, Pas Foto, Surat lamaran, Surat Keterangan pengalaman kerja, Surat Pernyataan, dan dokumen penunjang sesuai ketentuan formasi yang dilamar. Setelah semua berkas lengkap, calon peserta bisa segera mendaftarkan diri pada seleksi PPPK Teknis 2022, Berikut ini alur Pendaftarannya:

1. Membuat Akun
 - Calon pendaftar membuat akun di sscasn.bkn.go.id
 - Mengisi data diri seperti NIK, KK, dan Informasi diri.
 - Membuat password akun SSCASN
 - Upload foto KTP dan swa foto KTP
 - Pelamar mencetak kartu informasi akun

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

2. Daftar Formasi
 - Lengkapi biodata diri
 - Pilih jenis seleksi PPPK Teknis
 - Pilih formasi
 - Upload dokumen terkait
 - Resume
 - Cetak kartu peserta
3. Seleksi Administrasi
 - Panitia akan menverifikasi data pelamar
 - Panitia kemudian mengumumkan hasil seleksi administrasi
 - Pelamar melakukan sanggah
 - Panitia mengumumkan hasil sanggah
 - Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian
4. Seleksi Kompetensi
 - Data peserta yang lolos administrasi akan dikirim ke CAT BKN untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi
 - Nilai ujian seleksi kompetensi akan ditayangkan secara Live di Youtube BKN tempat dimana ujian dilaksanakan
5. Pengumuman Kelulusan
 - Setelah nilai diolah, panitia akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi
 - Pelamar dapat melakukan sanggah
 - Panitia mengumumkan hasil sanggah
 - Pelamar yang lolos akan melakukan pemberkasan dan menunggu NIPPPK.

3.4. Seleksi Kompetensi PPPK Teknis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK maka setelah seleksi administrasi berakhir tahap seleksi pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi PPPK terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis kompetensi. Pada 8 Februari 2023 Kemenpan RB menyampaikan materi pokok soal seleksi kompetensi Teknis agar para peserta seleksi PPPK dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai kompetensi jabatannya. Materi pokok seleksi ini disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai yang tercantum pada PermenPANRB No.29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Terdapat 173 Jabatan dengan masing-masing daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis PPPK 2022. Contohnya untuk Jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama materi pokoknya adalah:

- Pengetahuan substansi kebijakan
- Metode riset
- Teknik dan analisis kebijakan
- Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi
- Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama
- Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi

Ada 6 materi pokok kompetensi teknis yang diuji terkait jabatan analis kebijakan ahli pertama. Seleksi Kompetensi PPPK Teknis terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural dan 10 soal wawancara. Dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya selama 130 menit. Total nilai yang diperoleh oleh peserta maksimal 690

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

dengan pembagian 450 kompetensi teknis, 200 gabungan manajerial dan sosial kultural, dan 40 wawancara.

Menurut keputusan menteri PANRB No.971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional tahun 2022 untuk jabatan ahli pertama analisis kebijakan nilai ambang batas nya 293. Artinya peserta harus menjawab 59 soal dengan benar dari total 90 soal kompetensi teknis agar bisa lulus ambang batas 293 tersebut. Begitupun dengan formasi jabatan yang lainnya memiliki nilai ambang batas kompetensi teknis yang berbeda-beda rentang nilainya dari 180-338 nilai ambang batas.

3.5.Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto

Pengadaan PPPK Teknis merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya ASN pada lingkungan pemerintah kota Sawahlunto. Setiap pengadaan PPPK diumumkan melalui media masa seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Sawahlunto, mereka mengumumkan penerimaan PPPK Teknis di halaman website bkpsdm.sawahluntokota.go.id dan juga di Instagram [bkpsdm_kotasawahlunto](https://www.instagram.com/bkpsdm_kotasawahlunto). Dua media yang digunakan tersebut sangat efektif saat sekarang ini karena bisa menyebar secara masif kepada kelompok sasaran. Pendaftaran PPPK hanya dilakukan secara *Online* melalui SSCASN, masa pendaftaran mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023.

Implementor kebijakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga teknis (PPPK Teknis) adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kota Sawahlunto dan UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Padang. Kedua instansi tersebut memiliki peran masing-masing dengan tujuan yang sama. UPT BKN Padang berperan sebagai fasilitator penyedia sistem CAT untuk ujian PPPK Teknis. Sasaran kebijakan adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan non kependidikan dan memenuhi kualifikasi serta memiliki pengalaman sesuai dengan yang telah diatur pada KEPMENPAN 970 tahun 2022. Sosialisasi penerimaan PPPK di Kota Sawahlunto diumumkan melalui Website BKPSDM Kota Sawahlunto pada 7 November 2022.

Setelah masa pendaftaran berakhir pada tanggal 14 Januari 2023 di umumkan hasil seleksi administrasi penerimaan PPPK untuk jabatan fungsional teknis Kota Sawahlunto. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh panitia seleksi PPPK Teknis ada 264 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Peserta yang tidak lulus memiliki kesempatan untuk melakukan sanggah, masa sanggah hasil admnistrasi dilakukan mulai 16 Januari sampai 18 Januari 2023. Dari hasil sanggah tersebut ada 5 orang tambahan yang dinyatakan lulus admnisitrasi. Jadi ada 269 orang peserta seleksi PPPK Teknis Kota Sawahlunto.

BKPSDM Sawahlunto menghubungi masing-masing peserta yang lulus untuk kemudian di masukkan kedalam grup WA dengan tujuan berbagi informasi terkait seleksi PPPK Teknis Sawahlunto. Informasi pertama yang dibagikan oleh BKPSDM adalah jadwal simulasi ujian CAT, BKPSDM bekerja sama dengan UPT BKN Padang akan melaksanakan simulasi ujian CAT pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023. Tujuan dari simulasi adalah untuk memperkenalkan tata cara menggunakan aplikasi CAT. Ujian simulasi tersebut dibagi menjadi beberapa sesi, setiap sesi diikuti oleh 40 orang peserta seleksi PPPK Teknis Kota Sawahlunto. Simulasi berlangsung hanya 30 menit setiap sesinya, simulasi berjalan lancar dan tidak ada kendala jaringan maupun kendala komputer pada saat pelaksanaannya. Rata-rata semua peserta seleksi telah pernah sebelumnya menggunakan aplikasi CAT BKN tersebut. BKN sendiri telah mengembangkan aplikasi sejak tahun 2013. Simulasi tes itu tidak wajib diikuti, namun disarankan peserta mengikutinya. Pada saat hari simulasi memang ada peserta yang tidak hadir, ujian simulasi diadakan di kantor UPT BKN Padang dihari kerja sehingga ada peserta yang dari luar kota tidak bisa hadir pada saat simulasi tersebut.

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

Kebijakan rekrutmen PPPK Teknis kota Sawahlunto menggunakan APBD Kota Sawahlunto. Panitia seleksi nya merupakan ASN BKPSDM Kota Sawahlunto berjumlah 5 orang, kemudian dari BKN Padang ada 5 orang juga. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan.

Pelaksanaan seleksi mengikuti SOP yang telah disepakati antara implementor dengan kelompok sasaran. Untuk menghindari kecurangan dilakukan serangkaian pengecekan identitas peserta dan pengecekan tubuh peserta sebelum masuk pada ruangan tes seleksi menggunakan CAT. Ini adalah bentuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Komitmen agar tes PPPK Teknis Sawahlunto dilakukan secara transparan telah dilaksanakan sejak simulasi tes menggunakan sistem CAT di Kantor UPT BKN Padang.

Alur kebijakan rekrutmen PPPK Teknis berdasarkan pada arah Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Hal ini menyebabkan beberapa kali penyesuaian jadwal seleksi. Keterlambatan proses tersebut karena seleksi PPPK Teknis bersifat Nasional. BKPSDM Kota Sawahlunto dan UPT BKN Padang menunggu arahan dari BKN Pusat terkait pelaksanaan Ujian CAT dan tahapan lainnya. Bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Petunjuk Teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Teknis sudah mengacu pada tujuan dan sasaran kebijakan rekrutmen PPPK Teknis.

Jadwal seleksi kompetensi PPPK Teknis Kota Sawahlunto berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN No: 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 kepada pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ujian per sesi ada 2 sesi per hari dan ada 3 sesi per hari. Setiap hari sesi pertama dimulai pukul 6.30-08.00 pada waktu tersebut dilakukan registrasi dan pemeberian PIN peserta, kemudian body checking, peserta masuk ruang steril dan menitipkan barang sebelum masuk kedalam ruang ujian. Pelaksanaan seleksi pada sesi pertama dimulai 08.00-10.10, pelaksanaan seleksi kompetensi sesi selanjutnya pukul 11.00-13.10, dan 14.00-16.10. Peserta yang terlambat pada saat PIN sesi telah ditutup tidak bisa melakukan registrasi dan tidak diperkenankan untuk mengikuti tes serta dianggap gugur. Pada saat seleksi PPPK Sawahlunto di UPT BKN Padang ada 1 orang peserta yang tidak datang pada 31 Maret 2023 sesi 1.

Hasil ujian ditampilkan secara Live Score di Youtube UPT BKN Padang, jadi terpantau secara transparan hasil nilai yang didapat oleh peserta seleksi PPPK Teknis. Berdasarkan ujian tersebut 29 orang peserta yang mengambil formasi Analisis Kebijakan tidak ada yang lulus nilai ambang batas. Hal ini mengakibatkan 7 formasi Analisis Kebijakan yang dibutuhkan oleh Kota Sawahlunto tidak terisi. Fenomena tersebut juga terjadi pada instansi pusat dan kabupaten kota lainnya. Banyak peserta yang tidak mampu melewati nilai ambang batas sehingga formasi yang ada tidak terisi. Berdasarkan data BKN formasi PPPK Teknis yang dibuka sebanyak 110.434 formasi dengan tingkat kelulusan 51.636. Artinya tidak sampai 50% kelulusan pada seleksi PPPK Teknis tahun anggaran 2022.

4. Kesimpulan

Proses pengangkatan PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman formasi, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, penetapan nomor induk PPPK (NIP). BKPSDM Kota Sawahlunto telah mengimplementasikan proses pengangkatan PPPK sesuai Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian No.18 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hasil akhir seleksi kompetensi PPPK untuk jabatan fungsional teknis di Kota Sawahlunto berdasarkan surat kepala Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana seleksi nasional pengadaan CASN 2022 Nomor: 3952/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 April 2023 adalah sebanyak 66 formasi yang terisi dari total 170 formasi yang tersedia.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan yaitu pertama banyak formasi yang tidak terisi disebabkan oleh peserta tidak lulus ambang batas nilai, diharapkan pemerintah daerah mendorong agar pemerintah pusat mereformulasi nilai ambang batas PPPK Teknis. Menerapkan sistem perankingan bagi peserta yang tidak lolos nilai ambang batas agar dapat mengisi formasi jabatan yang ada. Perankingan sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada saat seleksi ASN 2018, kondisinya saat itu banyak peserta yang tidak lulus ambang batas kemudian pemerintah menerapkan sistem perankingan agar formasi tidak kosong. Kedua, adanya afirmasi (penambahan nilai) berdasarkan keputusan Menpan RB Nomor 970 tahun 2022 terdapat 30 jabatan fungsional teknis yang mendapat afirmasi dalam seleksi PPPK teknis. Jabatan fungsional analis kebijakan dan analis perencanaan tidak memiliki afirmasi sehingga pada seleksi PPPK tahun 2022 paling banyak kosong jabatan tersebut. Untuk itu perlu dievaluasi kebijakan afirmasi tersebut karena tidak menguntungkan semua formasi. Dan yang terakhir nilai ambang batas yang ditetapkan oleh instansi pembina perlu dikaji ulang karena terlalu tinggi ambang batasnya. Mengingat pada persyaratan administrasi PPPK Teknis minimal telah bekerja sebagai honorer selama 2 tahun pada formasi yang dilamar, ini menandakan peserta yang lolos administrasi menguasai tugas pokok dan fungsi dari formasi tersebut.

Referensi

1. Aditya, Rifan. (2022). Alur Pendaftaran PPPK Teknis 2022. suara.com, Diakses Pada 26 Agustus 2023
2. Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
3. Agus/Humas MENPANRB. (2013). Kementerian PANRB Pertama Gelat Tes CPNS Dengan Sistem CAT. menpan.go.id, Diakses Pada 26 Agustus 2023.
4. Agustino, Leo. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. Jurnal Borneo Administrator Volume 16 (2), 253-270.
5. Bangsawan, Gema. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. JKSP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2 (1), 27-40.
6. Bkpsdm.Sawahluntokota.go.id
7. Del/Humas MENPANRB. (2022). Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022. menpan.go.id, Diakses Pada 26 Agustus 2023.
8. Hanamunika, G., Silvyia Sari, D., & Dai, R. M. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (Vol. 3, Issue 3).
9. Humas Kemenko PMK. (2020). Reformasi Birokrasi Kemenko PMK. kemenkopmk.go.id, Diakses Pada 26 Agustus 2023.
10. Maksin, M., Fiqri, & Hadi, A. (N.D.). Implementasi Pelaksanaan Progam PPPK Menurut UU No 5 Tahun 2014. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
11. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
12. Puji Rianto. (2020). Modul Metode Penelitian Kualitatif. Komunikasi UII.

Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPPK Teknis Kota Sawahlunto Tahun 2022

13. Purwanto Erwan Agus, & Sulistyastuti Dyah Ratih. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media.
14. Putsanra, Dipna Videlia. (2022). Daftar Formasi PPPK Tenaga Teknis 200 Di 61 Instansi. tirto.id, Diakses Pada 26 Agustus 2023.
15. Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. Universitas Islam Jakarta.
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
17. We/Aha. (2023). Komisi II Sebut Carut Marut Data Honorer Sebagai Kendala Penyusunan UU ASN. dpr.go.id, Diakses Pada 26 Agustus 2023.